

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2021



**DINAS PERHUBUNGAN
KOTA CIREBON**



Jl. Terusan Pemuda No.8 Sunyaragi
Kecamatan Kesambi Kota Cirebon

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami memanjatkan puji dan syukur atas segala limpahan rahmat dan hidayah yang telah diberikan, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Perhubungan Kota Cirebon Tahun 2021.

RKT ini berisi penjelasan Program dan Kegiatan serta Prakiraan maju anggaran Tahun 2021 secara keseluruhan bidang – bidang / UPT yang ada di Dinas Perhubungan Kota Cirebon, sehingga diharapkan dapat dengan mudah dibaca dan dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas pada manajemen identitas pelaporan.

Semoga dengan tersusunnya Rencana Kerja ini, Dinas Perhubungan Kota Cirebon ini dapat memberikan penjelasan dan informasi yang berguna sebagai media penjabaran Rencana Strategis serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kinerja di bidang perhubungan serta dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018 - 2023 yakni dengan visi Walikota terpilih adalah *"SEHATI KITA WUJUDKAN KOTA CIREBON SEBAGAI KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA DAN SEJARAH"*.

Cirebon, Februari 2021
**Kepala Dinas Perhubungan
Kota Cirebon**

Drs. ANDI ARMAWAN
NIP. 19691214 199003 1 005



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah menjadi sebuah mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan mengacu pada akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah. Komponen pelaksanaan SAKIP dimulai dari tahap perencanaan, hal ini sebagai upaya menjamin selarasnya sebuah perencanaan dengan kinerja yang akan dicapai. Tahap perencanaan sebagai sebuah tahap awal menjadi *urgent* karena mempengaruhi seluruh komponen pada SAKIP.

Perencanaan dalam SAKIP tingkat Dinas Perhubungan Kota Cirebon dimulai dari perencanaan jangka menengah yang terurai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagai rencana strategis dalam mewujudkan Visi dan Misi Kota Cirebon yang telah ditetapkan, selanjutnya rencana strategis yang memiliki periode 5 tahunan di pilah secara prioritas melalui penetapan Indikator Kinerja Utama. Sebagai pedoman tahunan target-target dalam perencanaan jangka menengah tersebut di ejawantahkan dengan disusun nya Rencana Kinerja Tahunan.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) mengurai sasaran strategis, indikator pencapaiannya dan target yang akan dicapai pada tahun berjalan. Hal ini merupakan salah satu pedoman yang memastikan keselarasan antara perencanaan dan tahapan pelaksanaan kinerja pada tahun berjalan, dengan demikian target kinerja yang ditetapkan dapat menjadi pertimbangan khususnya dalam menyusun rencana penganggaran.

1.2 Visi misi Kota Cirebon

Visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah merupakan ruh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang akan memberikan gambaran bagaimana pembangunan akan dijalankan selama lima tahun ke depan. Sesuai amanat Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebon Tahun 2005-2025, bahwa RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018-2023 merupakan tahap keempat pelaksanaan pembangunan jangka panjang. Sehubungan dengan hal tersebut, visi dan misi RPJMD harus memiliki konsistensi dan sinkronisasi dengan visi yang telah ditetapkan pada RPJPD, yakni ***“Dengan Nuansa Religius Kota Cirebon Menjadi Kota Perdagangan dan Jasa Yang Maju dan Sejahtera”***, yang dilaksanakan melalui 6 (enam) misi pembangunan jangka panjang sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat yang religius;
2. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas pendidikan untuk menciptakan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi;
4. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif, merata dan berkelanjutan;
5. Meningkatkan kelestarian lingkungan; dan
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik, sarana prasarana umum diikuti dengan terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Periode RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan tahap keempat dari RPJPD Kota Cirebon Tahun 2005-2025 dan sesuai dengan periode tahapan pembangunan jangka panjang daerah, maka tahap pembangunan keempat memfokuskan pada Akselerasi dan Pemantapan Pembangunan Infrastruktur Daerah. Oleh karena itu, dalam upaya semakin memantapkan daya dukung terhadap pembangunan, maka pada tahap ke-4 RPJP ditandai dengan terlihatnya peningkatan kualitas dan kuantitas pengamalan ajaran agama dan keharmonisan sosial, sehingga menjadi landasan pembangunan di Kota Cirebon, baik dalam pembangunan sumber daya manusia, ekonomi, pemerintahan, politik, hukum dan aspek-aspek lainnya.

Akselerasi dalam bidang kesehatan ditandai dengan meningkatnya Angka Harapan Hidup, menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) maupun Angka Kematian Anak Balita (AKABA) serta pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kota Cirebon.

Akselerasi dalam bidang pendidikan ditandai dengan meningkatnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dengan berjalannya Program Wajib Belajar 12 Tahun, menurunnya angka *drop out*, menurunnya angka buta huruf, peningkatan pendapatan per kapita dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sementara dalam aspek lingkungan ditandai dengan tersedianya sistem pengelolaan lingkungan yang berpedoman pada hasil kajian AMDAL.

Akselerasi dalam bidang daya beli masyarakat dengan sendirinya akan tumbuh dan berkembang apabila dibangun beriringan dengan optimalisasi pendidikan, ketrampilan/skill

yang didukung dengan tingkat kesehatan masyarakat yang baik serta sarana dan prasarana yang memadai.

Selain itu, dalam RPJPD Kota Cirebon 2005-2025 khususnya pada pelaksanaan pembangunan RPJMD tahap ke-4 tahun 2028-2023, telah ditetapkan tahapan pembangunan aspek suprastruktur dan infrastruktur, meliputi:

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas pemahaman serta implementasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Akselerasi pemantapan dan pembangunan serta pemeliharaan Puskesmas dengan fasilitas atau sarana dan prasarana yang lengkap di setiap kecamatan.
3. Akselerasi pemantapan dan pembangunan serta pemeliharaan Posyandu yang terkoordinasi dengan baik di setiap RW dan kelurahan.
4. Akselerasi penyediaan dan pemberdayaan serta pemeliharaan prasarana dan sarana pendidikan dasar berskala nasional/internasional.
5. Akselerasi pemantapan dan pembangunan serta pemeliharaan prasarana dan sarana pendidikan sebagai upaya mempercepat Wajib Belajar 12 Tahun.
6. Akselerasi peningkatan kualifikasi tenaga pendidik dan kependidikan.
7. Akselerasi pembinaan dan pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) hingga pembentukan *Central Bisnis Distrik (CBD)*.
8. Akselerasi penetapan dan pembangunan serta pengembangan sistem supporting permodalan dan pendampingan bagi KUKM sektor produk unggulan Kota Cirebon.
9. Akselerasi pembangunan mekanisme keterlibatan aktif pemerintah terhadap produksi, distribusi, dan pemasaran produk unggulan daerah.
10. Akselerasi pembangunan dan pemeliharaan sistem terpadu dalam upaya penanggulangan banjir dan bencana alam serta penanganan permasalahan sosial.
11. Akselerasi pembangunan dan pemberdayaan lahan tidak produktif disertai dengan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (*bufferzone*).
12. Akselerasi peningkatan pendidikan ketrampilan bagi para nelayan.
13. Akselerasi peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja dan pengarusutamaan gender dalam pembangunan.
14. Akselerasi peningkatan destinasi wisata melalui pengembangan sarana dan prasarana pariwisata meliputi wisata sejarah, wisata bahari/pantai, wisata belanja, dan wisata kuliner.
15. Mantapnya kondisi pusat-pusat perbelanjaan yang mengakomodir kegiatan Pedagang Kakim Lima (PKL) secara proporsional.
16. Akselerasi penetapan fungsi jalan untuk mendukung sistem transportasi terpadu.
17. Akselerasi peningkatan jalan/jembatan yang menghubungkan kawasan-kawasan potensial tumbuh dan berkembang/interkoneksi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
18. Akselerasi pembangunan dan optimalisasi fasilitas Pra Sekolah/TK, SD/ sederajat dan SMP/ sederajat guna mendukung/mengimbangi pertumbuhan jumlah penduduk.

19. Akselerasi pembangunan jembatan penyebrangan orang (JPO) di titik-titik rawan kemacetan lalu lintas.
20. Akselerasi dan peningkatan kualitas serta kapasitas pelayanan infrastruktur.
21. Akselerasi pemberdayaan dan peningkatan profesionalisme aparatur dan kinerja pemerintah daerah.
22. Akselerasi dan revitalisasi pasar-pasar tradisional yang mengalami penurunan kualitas fisik lingkungan.
23. Akselerasi pembangunan, pemberdayaan sistem pengadaan dan pelayanan jaringan air bersih yang mandiri dan pembangunan/ pengembangan sanitasi pada daerah padat penduduk.

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Cirebon 2018-2023.

RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018-2023 merupakan tahap ke-empat dari RPJPD Kota Cirebon Tahun 2005-2025. Pada tahap ini fokus pembangunan diarahkan pada upaya Pemantapan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam mewujudkan Kota Cirebon yang maju dan sejahtera berlandaskan keimanan dan ketaqwaan berbasis budaya dan kearifan lokal. Dengan demikian, visi pembangunan jangka menengah pada tahun 2018-2023 harus mengacu pada fokus pembangunan tersebut agar terwujud perencanaan pembangunan yang sinkron, konsisten dan berkelanjutan. Adapun visi pembangunan jangka menengah Kota Cirebon Tahun 2018 – 2023 adalah :

**“SEHATI Kita Wujudkan Cirebon Sebagai Kota Kreatif Berbasis
Budaya dan Sejarah”**

Pernyataan visi Kota Cirebon Tahun 2018 – 2023 memiliki makna sebagai berikut :

1. SEHATI, berarti satu hati atau seia sekata, menunjukkan bahwa seluruh komponen (masyarakat dan *stakeholders* pembangunan) harus bahu membahu mewujudkan kemajuan Kota Cirebon. Mewujudkan masyarakat yang sehat bukan hanya pada kata sehat secara harfiah fisik semata, tetapi bermakna pula pada masyarakat yang sehat rohani, jasmani dan sosial.
2. Sehat, adalah suatu kondisi yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni masyarakat dengan mengoptimalkan potensi ekonomi masyarakat yang saling mendukung. Kesehatan dapat dicapai dan berkelanjutan apabila semua aspek yang meliputi sosial, ekonomi, lingkungan dan budaya diperhatikan, dengan penekanan tidak cukup hanya pada pelayanan kesehatan, tetapi kepada seluruh aspek yang mempengaruhi kesehatan masyarakat, baik jasmani maupun rohani.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum yang dijadikan rujukan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan Kota Cirebon , yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;
11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Koa Cirebon;
14. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

1.4 Tujuan

Penyusunan Rencana Kinerja Tahun (RKT) Dinas Perhubungan Kota Cirebon Tahun 2021 ini dimaksudkan sebagai instrumen dalam melaksanakan Manajemen Kinerja SAKIP Dinas Perhubungan Kota Cirebon. Adapun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini bertujuan untuk :

- a. Dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kinerja tahun 2021;
- b. Sebagai pedoman keselarasan antara target kinerja dan rencana kerja anggaran
- c. Sebagai Pedoman dalam menyusun Perjanjian Kinerja.

BAB II
RENCANA KINERJA

Rencana Kinerja merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Cirebon tahun 2018 – 2023. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang dalam hal ini adalah kegiatan dalam APBD tahun anggaran 2021. Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun tertentu. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, sehingga penetapan sasaran harus selaras dan mempunyai hubungan logis dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Sasaran bersifat spesifik dan terukur berdasarkan indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaiannya. Sasaran yang akan dicapai Dinas Perhubungan Kota Cirebon selama tahun 2021 secara rinci disajikan dalam formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) seperti berikut:

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021

Tabel
Rencana Kinerja Tahunan

No.	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Target	
						2021	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Umum Berwawasan Lingkungan							
Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Jalan							
Menurunkan Titik Rawan Kemacetan Lalu Lintas							
Meningkatkan Layanan Sarana Angkutan Umum Masyarakat							
Tersedianya Angkutan Umum Massal Yang Ramah Lingkungan							
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik							
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
Tingkat Pelayanan Ruas Jalan Satuan							
Jumlah Titik Rawan Kemacetan							
Rasio Kendaraan Angkutan Umum Terhadap Jumlah Penduduk							
Rasio Jumlah Armada Yang Ramah Lingkungan Terhadap Jumlah Armada							
Indeks Kepuasan Masyarakat							
Terwujudnya tertib pelayanan administrasi perkantoran (jumlah realisasi output kegiatan dalam program dibagi jumlah target output kegiatan dikali 100%)							
Terperluhinya sarana dan prasarana kantor (jumlah realisasi output kegiatan dalam program dibagi jumlah target output kegiatan dikali 100%)							
Tingkat Kehadiran Pegawai Tinggi							
Hasil Penilaian Kinerja ASN pasa survey kepuasan pelanggan							
Tersedianya gambaran kondisi kinerja keuangan SKPD							
Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja							
Dokumen Renstra PD							
Dokumen Renstra Perubahan PD							
Dokumen Renja PD							
Dokumen Renja PD Perubahan							
Dokumen RKA							
Dokumen Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan							
Dokumen Renstra PD							
Dokumen Renja PD							
Dokumen Renja PD Perubahan							
Dokumen RKA							
Dokumen Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan							
Dokumen Renstra PD							
Dokumen Renja PD							
Dokumen Renja PD Perubahan							
Dokumen RKA							

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021

			Dokumen RKAP	1 Dokumen
			Dokumen DPA	1 Dokumen
			Dokumen DPPA	1 Dokumen
			Dokumen Dalev Triwulan I, II, dan III Tahun 2021	3 Dokumen
			Dokumen Dalev Triwulan IV 2021	1 Dokumen
			Dokumen SOP Dishub	1 Dokumen
			LKPJ	1 Dokumen
			LPPD	1 Dokumen
			LAKIP	1 Dokumen
			Dokumen Administrasi Keuangan	3 Jenis
			Laporan Kinerja Utama PTT	12 Laporan
			Laporan pelaksanaan realisasi kinerja triwulan	4 Dokumen
			Laporan pelaksanaan realisasi kinerja Tahunan	1 Dokumen
			Laporan PK	1 Dokumen
			Laporan keuangan akhir tahun (CALK)	1 Dokumen
			Dokumen Administrasi Umum	22 Jenis
			Materai 6000	750 buah
			Materai 3000	600 buah
			Struk Pembayaran Tagihan Rekening Listrik	36 Struk Rekening
			Struk Pembayaran Tagihan Rekening telepon	12 Struk Rekening
			Struk Pembayaran Tagihan Rekening air (PDAM)	36 Struk Rekening
			Struk Pembayaran Tagihan Rekening TV Satelit	36 Struk Rekening

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Petugas/Tenaga pengamanan	12 orang	
	STNK/SKPD PKB R4	5 unit	
	STNK/SKPD PKB R3	3 unit	
	STNK/SKPD PKB R2	32 unit	
	STNK/SKPD PKB Bus dan Truk	3 unit	
	KIR Piek Up	4 unit	
	KIR Truk	3 unit	
	Petugas/Tenaga kebersihan kantor	11 orang	
	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	28 Jenis	
	Alat Tulis Kantor	46 Jenis	
Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaian Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Barang Cetakan	13 Jenis	
	Pengandaian	250,000 Lembar	
	Surat Kabar Harian Lokal	3 Koran/Media	
	Surat Kabar Harian Regional/Provinsi	1 Koran/Media	
	Surat Kabar Harian Nasional	1 Koran/Media	
	Buku / Peraturan Perundang-undangan	5 Buku	
	Terpasangnya Iklan di surat kabar harian	60 iklan	
	Tersedianya Peraturan walikota	1 perwal	
	Isi Tabung LPG 12 KG	12 Kali	
	Tabung APAR	20 Unit	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman	Laporan/Notulensi rapat internal/briefing	12 Laporan	
	Laporan mamin harian pegawai	12 Laporan	
	Laporan penerimaan/ kunjungan tamu	12 Laporan	
	Laporan hasil pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 laporan	
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Laporan Sinergitas	1 Laporan	

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021

		Tersedianya Operator ATCS Dinas Perhubungan Kota Cirebon	8 orang	
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		Dokumen Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	1 Jenis	
Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal		Tersedianya pelayanan terminal tipe C	1 tahun	
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		Dokumen Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	2 Jenis	
Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kab/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Penerbitan Petugas Parkir	150 kali	
		Pembinaan Petugas Parkir	500 orang	
		Dokumen Kajian Parkir	1 Dokumen	
		pakaian juru parkir	500 stel	
		penggunaan UPT Parkir	18000 lembar	
		Cetak kwitansi dan karcis retribusi parkir	56804 buku	
		alat tulis kantor UPT Parkir	24 jenis	
		BBM dan Pemeliharaan Kendaraan	12 bulan	
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Dokumen Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4 jenis	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		BBM dan Oli Genset	1 tahun	
		Tab	3 unit	
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Kendaraan Bermotor		Bukti Lulus Uji Pengujian Kendaraan Bermotor dalam Bentuk <i>Smart Card</i>	2 Jenis	
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Servis Alat Uji	1 kali	
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12 Laporan	

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021

Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	3 Jenis
Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Halte	2 unit
	rambu - rambu lalu lintas untuk menunjang keselamatan dan kelancaran berlalu lintas	100 buah
	marka jalan	5000m2
	separator	100 buah
	paku jalan	500 buah
Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	sosialisasi terkait kebijakan teknis perhubungan	4 kali
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Provinsi	Pemeriksaan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Angkutan Umum	2 kali
	Menekan tingkat kecelakaan dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan (operasi penertiban gabungan dengan polisi)	1 tahun
	Personil Pelayanan angkutan lebaran, Natal dan Tahun Baru	3 kali
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	Dokumen Audit dan Inspeksi Keselamatan di Jalan Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Tingkat Kota	2 Jenis 30 Peserta
	Terpilihnya Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Tingkat Kota Cirebon	3 Peserta
	tersedianya dokumen hasil audit dan investigasi keselamatan lalu lintas	1 dokumen

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021

Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Sosialisasi penggunaan angkutan umum pada masyarakat	12 kali	
	Sosialisasi / penyuluhan kepada masyarakat terhadap ketertiban berlalu lintas di jalan	2 kali	
	Penyuluhan keselamatan pengguna kendaraan bermotor	48 kali	
	Terselenggaranya Bimbingan Teknis Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	4 kali	
	Dokumen lomba tertib lalu lintas dan angkutan jalan (W/TN)	1 dokumen	
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang	1 Jenis	
	Trayek BRT di Kota Cirebon	1 Lintasan Trayek	
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah	1 Jenis	
	terciptanya pengetahuan bagi para sopir/juru mudi terhadap aturan dalam berlalu lintas di jalan	50 orang	
Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Pemilihan awak angkutan umum teladan tingkat kota Cirebon	3 orang	
	Pembinaan sopir / awak angkutan umum	40 orang	
	Teridentifikasinya armada dan krew angkutan kota di masing-masing trayek	979 orang	

BAB III PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perhubungan Kota Cirebon Tahun 2021 ini disusun dalam rangka memenuhi mekanisme penyelenggaraan SAKIP serta sebagai proses penyelarasan antara target pada tahun berjalan dengan rencana strategis yang berjangka waktu 5 (lima) tahunan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dengan demikian target yang termuat dalam rencana strategis tersebut dapat dipastikan menjadi target kinerja tahunan yang akan menjadi ikhtiar di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Cirebon untuk mencapainya. Selanjutnya Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah (RKT) ini menjadi acuan sebagai pertimbangan dalam menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2021 serta rencana kerja anggaran pada tahun 2021.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan Kota Cirebon Tahun 2021 ini telah disusun, keselarasan antara kinerja dan target pada sasaran strategis semestinya diupayakan dengan memulai perencanaan yang baik dan selaras, dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini dapat menjadi sebuah pedoman gambaran kinerja yang harus dicapai berdasarkan sasaran strategis di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Cirebon pada tahun berjalan. Tahun 2021. Terimakasih kami sampaikan kepada seluruh elemen pemangku kepentingan di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Cirebon, semoga dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini dapat menjadi gambaran kinerja Dinas Perhubungan Kota Cirebon yang mesti dicapai di tahun 2021 dan dokumen ini dapat dipergunakan sebagai mestinya.